

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK DI SURAKARTA
(Tinjauan Atas Implementasi Program Kota Layak Anak)



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

AVIP RUSDI HANANTO

C100 170 055

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2021

HALAMAN PERSETUJUAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK DI SURAKARTA
(Tinjauan Atas Implementasi Program Kota Layak Anak)

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

AVIP RUSDI HANANTO

C 100170 055

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'B. Sukoco', written in a cursive style.

(Bambang Sukoco, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Jumat

Tanggal : 1 Oktober 2021

Dewan Penguji

Ketua : Bambang Sukoco, S.H., M.H. (.....)

Anggota : Hartanto, S.H., M.Hum. (.....)

Anggota : Sudaryono, S.H., M.Hum. (.....)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.)

NIDN. 0026126801

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan diatas maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya.

Surakarta, 20 September 2021

Penulis



Avip Rusdi Hananto

C100170055

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK DI SURAKARTA (Tinjauan Atas Implementasi Program Kota Layak Anak)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Program Kota Layak Anak di Surakarta. Kemudian untuk mengetahui efektivitas penjaminan hak anak melalui Program Kota Layak Anak yang didalam programnya mengadopsi hak-hak anak yang telah diatur didalam perundang-undangan, serta berbagai kendala yang dialami dalam pelaksanaan Program Kota Layak Anak. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang sumber data utamanya adalah data primer yakni berupa wawancara dengan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Program Kota Layak Anak, selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder dalam wujud buku, jurnal maupun bahan pendukung lainnya. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh akan dianalisis dan diteliti dan kemudian diuraikan dalam bentuk narasi yang nantinya akan dihubungkan dengan teori dan peraturan perundang-undangan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. Dari penelitian ini diperoleh bahwa Program Kota Layak Anak suatu trobosan agar hak-hak anak dapat terpenuhi sepenuhnya. Walaupun didalam implementasinya, belum semua hak anak dapat terpenuhi dengan baik, tetapi setidaknya dengan adanya Program Kota Layak Anak, anak-anak di kota Surakarta khususnya, haknya sudah lebih terjamin atau terpenuhi dengan adanya berbagai fasilitas yang telah tersedia. Suatu program atau kebijakan tidak luput dari hambatan, dalam Program Kota Layak Anak ini masih ada beberapa hambatan yang harus terus dievaluasi dan diperbaiki kembali, demi menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan mendidik bagi anak, sehingga akan melahirkan generasi penerus bangsa yang memiliki kualitas dan integritas yang tinggi serta dapat mewujudkan cita-cita bangsa. Maka peran keluarga, masyarakat sekitar, dan pihak terkait sangatlah penting, untuk bersama-sama mewujudkan kota Surakarta menjadi Kota Layak Anak.

Kata Kunci : *Hak, Perlindungan, Anak*

Abstract

This study aims to determine the implementation of the Child Friendly City Program in Surakarta. Then to find out the effectiveness of guaranteeing children's rights through the Child Friendly City Program which in its program adopts children's rights that have been regulated in legislation, as well as various obstacles experienced in the implementation of the Child Friendly City Program. This study uses an empirical juridical approach where the main data source is primary data in the form of interviews with parties involved in the implementation of the Child Friendly City Program, in addition to primary data, this study also uses secondary data in the form of books, journals and other supporting materials. This research is descriptive analysis using a qualitative approach. Data collection techniques were carried out by means of interviews, and literature study. The data

obtained will be analyzed and researched and then described in the form of a narrative which will later be linked to theories and laws and regulations in order to obtain answers to the problems in this research. From this research, it was found that the Child Friendly City Program is a breakthrough so that children's rights can be fully fulfilled. Although in its implementation, not all children's rights can be fulfilled properly, but at least with the Child Friendly City Program, children in the city of Surakarta in particular, their rights are more secure or fulfilled with the various facilities that are available. A program or policy does not escape obstacles, in this Child Friendly City Program there are still several obstacles that must be continuously evaluated and repaired, in order to create a safe, comfortable and educational environment for children, so that it will give birth to the nation's next generation that has quality and integrity. and can realize the ideals of the nation. So the role of the family, the surrounding community, and related parties is very important, to jointly realize the city of Surakarta into a Child Friendly City.

Keywords: *Rights, Protection, Children*

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Negara hukum merupakan suatu negara di mana segala tindakan atau perbuatan harus terdapat dasar hukumnya dan telah diatur oleh hukum.¹ Hukum dijadikan sebagai tolok ukur dalam penyelesaian masalah sangat kompleks yang terjadi didalam suatu kehidupan bermasyarakat, baik permasalahan antar individu, kelompok maupun permasalahan yang berkaitan dengan negara.²

Kota/Kabupaten Layak Anak merupakan salah satu bentuk pembangunan yang difokuskan pada pemenuhan hak anak yang melibatkan komitmen bersama antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha pada suatu program kebijakan yang telah disusun dan direncanakan sebelumnya serta dilaksanakan secara berkelanjutan guna menjamin tercapainya hak-hak anak. Hak anak pada hakikatnya merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat digannggu gugat. Orang tua, masyarakat,

¹ Natangsa Surbakti, 2010, *Filsafat Hukum Perkembangan Pemikiran dan Relevansinya dengan Reformasi Hukum Indonesia*, Surakarta: BP-FKIP UMS, hlm. 68.

² Janpatar Simamora, 2014, Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 3 September 2014, hal 556.

pemerintah serta negara wajib menjamin, melindungi, dan memenuhi hak tersebut. Program *child-friendly city* (KLA) dipopulerkan oleh UNICEF yang bertujuan agar dapat menciptakan lingkungan yang membantu pengimplementasian hak-hak anak lewat peraturan dan kebijakan oleh pemerintah lokal.³

Praktiknya, di Kota Surakarta yang telah ditetapkan sebagai Kota Layak Anak Utama masih belum berjalan secara optimal. Kabupaten/Kota Layak Anak memiliki lima tingkatan peringkat, yaitu mulai dari pratama, madya, nindya, utama, dan paripurna. Pelanggaran hak anak seharusnya tidak terdapat kembali pada Kota Layak Anak Utama di Kota Surakarta, yang latar belakangnya melindungi hak anak, yang tentunya akan menjadi penghambat efektivitas pelaksanaan program Kota Layak Anak.

Menurut Dinas Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surakarta, pada tahun 2018 telah tercatat 3 kasus pemerkosaan/persetubuhan, 10 kasus pencabulan, 1 kasus penganiayaan, 20 kasus KDRT, 3 kasus hak asuh anak, 1 kasus perdagangan, 1 kasus narkoba, 2 kasus bullying, dan 4 kasus penelantaran dan psikis. Pada tahun 2019 tercatat 11 kasus kekerasan seksual, 3 kasus penganiayaan, 15 kasus KDRT, 6 kasus hak asuh anak, 1 kasus perdagangan, 4 kasus *bullying*, dan 6 kasus psikis dan penelantaran. Pada tahun 2020 tercatat 5 kasus kekerasan seksual, 2 kasus penganiayaan, 14 kasus KDRT, 2 kasus hak asuh anak, 3 kasus pencurian, dan 10 kasus *bullying*.⁴

Maka berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis telah merumuskan permasalahan sebagai berikut: (a) Bagaimana perlindungan anak menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta dalam Perspektif Hukum Islam?; (b) Bagaimana implementasi perlindungan hak anak dalam program kota layak anak di Kota Surakarta?

³ Moh Ilham A Hamudy, 2015, Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak Di Surakarta Dan Makassar, Jurnal Bina Praja, Volume 7 Nomor 2 Edisi Juni 2015 : 149 – 160, hal 150.

⁴ Open Data Kota Surakarta, Rabu, 24 februari 2021, 13.15 WIB: Data Penanganan Kasus terhadap Perempuan dan Anak di Kota Surakarta, dalam <http://data.surakarta.go.id/sk/dataset/data-penanganan-kasus-terhadap-perempuan-dan-anak-di-kota-surakarta-tahun-2019>.

Dari latar belakang dan rumusan masalah sebagaimana yang telah Penulis uraikan diatas, tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah (1) Mengetahui perlindungan terhadap hak anak atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak serta dalam Perspektif Hukum Islam. (2) Mengetahui pengimplementasian perlindungan hak-hak anak dan perlindungan anak dalam Program Kota Layak Anak (KLA) di Kota Surakarta.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Dimana objek yang akan dianalisis dalam penelitian ini akan dituliskan menggunakan metode deskriptif analisis, artinya memberikan suatu pandangan dengan menganalisis secara sistematis dan cermat yang kaitannya dengan fakta yang berhubungan dengan keadaan tertentu. Sumber data yang terdiri data primer yakni berupa wawancara narasumber mengenai pengimplementasian Program Kota Layak Anak di Surakarta, dan data sekunder yakni sumber hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi kepustakaan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan anak menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

W.J.S. Poerwodarminto berpendapat, bahwa anak adalah seseorang yang belum dewasa atau masih kecil.⁵ Anak merupakan salah satu tanggungjawab negara yang harus dilindungi dan dijamin haknya, pada dasarnya anak merupakan suatu bentuk investasi masa depan suatu bangsa, yang mana anak juga memiliki peran yang tidak tergantikan atau dikesampingkan, mengingat anaklah yang akan

⁵ Abintoro Prakoso, 22016, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta:LekasBang PRESSindo, hal 35.

mewujudkan bangsa dan negara untuk menuju lebih baik lagi dalam berbagai aspek kehidupan.

Anak dalam arti yuridis didasarkan pada usia yang telah ditentukan. Namun masih terjadi tumpang tindih antara Undang-Undang satu dengan yang lainnya dalam perumusan anak, sehingga tidak selaras. Hal ini tentunya akan berkaitan dengan pertimbangan kepentingan tertentu dan tujuan tertentu, kemudian sejalan dengan Konvensi tentang hak-hak anak.⁶

Hukum perlindungan anak mempunyai kedudukan yang krusial, terutama dalam menentukan masa depan bangsa, yang tentunya dengan dukungan dari lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Hukum yang mengatur tentang perlindungan anak seharusnya lebih dipertegas dan diperberat kembali, dengan alasan bahwa, apabila sanksi yang diberikan lebih tegas dan lebih berat, diharapkan pelaku mendapatkan efek jera, dan mendorong memulihkan kembali fisik, psikis, dan sosial anak sebagai korban. Anak mempunyai berbagai macam masalah yang kompleks, terlepas dari tindakan fisik maupun non fisik, ada juga anak jalanan yang terpaksa hidup dijalan tanpa ada kepastian akan kehidupan, hak anak dan masa depan yang kurang jelas.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang sudah berlaku kurang lebih 12 (dua belas) tahun kemudian” diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Inti dari perubahan tersebut tidak lain yaitu mempertegas dan pemberatan sanksi bagi pelaku kejahatan pada anak. Hal demikian dilakukan dengan tujuan untuk mengantisipasi anak sebagai korban kejahatan pada masa yang akan datang tidak menjadi pelaku kejahatan dengan kasus yang sama yang pernah menimpanya.⁷”

⁶ Liza Agnesta Krisna, 2012, Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Yogyakarta: CV Budi Utama, hal 13.

⁷ Muliawan, 2015, Paradigma Baru Hukum Perlindungan Anak Pasca Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak, dalam <http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/164->

Setiap anak memiliki hak yang harus dilindungi dan dijamin. Antara lain, perlindungan hak dalam bidang agama, perlindungan hak dalam bidang pendidikan, perlindungan hak dalam bidang kesehatan, perlindungan hak dalam bidang sosial, perlindungan hak dalam bidang khusus.

3.2 Perlindungan Anak menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hukum perlindungan terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Telah menjadi tanggung jawab bersama bagi para penegak hukum kaitannya dengan perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).

Andi Hamzah menyatakan bahwa pembedaan disebut juga sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman. Dalam bahasa Belanda disebut *strafoemeting* dan dalam bahasa Inggris disebut *sentencing*.⁸

Segala sesuatu tentang proses peradilan pidana anak telah diatur dalam UU tersebut, mulai dari awal tingkat penyelidikan hingga proses menjalani hukuman pidana. Hal ini didasarkan berdasarkan asas yang termuat dalam UU SPPA No. 11 Tahun 2012.

Seorang ahli bernama J.E. Sahetapy mengungkapkan bahwa suatu perdamaian tanpa perdamaian adalah sebuah penindasan dan keadilan tanpa perdamaian adalah bentuk baru penganiayaan. Tidak semua dan tidak selamanya sanksi pidana berprinsip memberikan” hukuman, dapat juga berupa pengasingan menjadikan jalan terakhir bagi pelaku tindak pidana, terkhusus anak. Namun pengasingan juga bukan merupakan suatu solusi yang baik, terlebih menyelesaikan masalah

[paradigma-baru-hukum-perindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perindungan-anak](#) diunduh pada Sabtu 12 Juni 2021 22.35.

⁸Andi Sofyan & Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press, hal 84.

yang berkaitan dengan anak. Akan terlihat miris jika setiap mengkondisikan kejahatan sebagai selalu mendapatkan pemenjaraan.⁹

Hukuman pemenjaraan tentunya akan menimbulkan dampak negatif, diantaranya dapat menyebabkan gangguan psikologis maupun juga dampak secara sosial. Setelah proses hukuman selesai, masalah anak tidak akan berhenti pada tahap itu, tentunya akan timbul *stigma* yang kurang baik bagi anak dari masyarakat sekitar. Sehingga anak akan merasa terasingkan atau merasa terbuang dari lingkungan sekitar akibat hukuman yang telah anak jalani sebelumnya.

Penyelesaian dengan metode *restorative justice* tentunya juga berlandaskan sistem peradilan pidana anak yang sebagaimana telah diatur dan dijelaskan di dalam UU SPPA. Maka wajib hukumnya para aparat penegak hukum menghormati hak-hak anak sebagai tersangka, seperti diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah, jika pengadilan belum memvonis seseorang itu bersalah. Anak juga memiliki hak untuk membela diri agar tidak dijatuhi hukuman yang berat, sehingga dapat menerima hukuman yang sesuai dengan apa yang dilakukan atau proporsional. Dengan demikian maka hak anak yang sedang berhadapan dengan hukum akan dihormati dan terlindungi dengan baik.

3.3 Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam.

Anak merupakan sosok anugrah indah yang diturunkan oleh Allah Swt. Sudah selayaknya untuk kita mensyukuri anugrah tersebut, anak hadir sebagai pelengkap kehidupan manusia dalam menjalani rumah tangga. Anak bukan hanya anugrah indah, yang telah di berikan oleh Allah Swt. Seorang anak merupakan titipan atau amanah dari Allah Swt. yang diberikan kepada orang tua. Anak adalah sosok yang suci, maka anak akan tergantung pada orang tua yang mengasuh kelak, atau

⁹ Bambang Sukoco, 2016, "PENDEKATAN RESTORATIF JUSTICE SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA CYBER DENGAN PELAKU ANAK (Studi tentang Penyelesaian Tindak Pidana Cyber di SMP Negeri Ngemplak, Boyolali)", Jurnal Law and Justice, Vol. 1 No. 1 Oktober 2016, hal 59

dapat dikatakan bahwa anak merupakan cerminan dari perilaku orang tuanya. Rasulullah saw. bersabda, *“Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan Yahudi, Nasrani, atau Majusi.”*(HR. Al-Bukhari).¹⁰

Seorang anak didalam Islam memiliki hak yang harus dijamin dan diberikan, terutama dari pihak orang tuanya. Hak anak dapat diartikan bahwa segala sesuatu yang sudah semestinya didapatkan oleh anak dari orang tua atau walinya. Cukup banyak Islam mengatur mengenai hak anak, diantaranya diatur dalam ayat-ayat Al-Quran dan Hadis Nabi yang membahas mengenai hak anak, diantaranya :

- a. Hak memperoleh Nasab (Identitas Diri)
- b. Memperoleh Penyusuan (Radha')
- c. Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang
- d. Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka
- e. Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan
- f. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- g. Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat
- h. Hak mendapatkan cinta kasih
- i. Hak untuk bermain

3.4 Implementasi Perlindungan Hak Anak dalam Program Kota

Layak Anak di Kota Surakarta

Menjamin terpenuhinya suatu hak, terutama pada anak merupakan suatu kewajiban khususnya bagi orang tua yang memiliki posisi paling dekat dengan anak.” Walaupun didalam Undang-Undang telah diatur bahwa menjamin hak anak juga menjadi tanggung jawab suatu Negara ataupun pemerintah. Hak warga negara Indonesia telah diatur dalam UUD 1945 pada pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28.¹¹ Disisi lain

¹⁰ Asy Syariah.com, Kamis, 6 Februari 2020, *Anak Lahir di Atas Fitrah*, dalam <https://asysyariah.com/anak-lahir-di-atas-fitrah/>

¹¹ Tim MKU LPIDB UMS, 2016, Materi Ajar Kuliah Pendidikan Pancasila, Sukoharjo: Jasmine, hal 37.

pemerintah telah berupaya untuk menjamin terpenuhinya hak anak melalui Program Kota/Kabupaten Layak Anak.

Pelaksanaan Program Kota/Kabupaten Layak anak telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Kemudian telah diatur lebih spesifik lagi pada Peraturan Menteri Negara PPPA Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, yang pada prinsipnya menjadi pedoman bagi pemerintah Kabupaten maupun Kota dalam melaksanakan program KLA, salah satunya adalah Kota Surakarta.

Kota Surakarta sejak tahun 2017 telah mendapatkan penghargaan sebagai Kota Layak Anak Utama karena Kota Surakarta dinilai lebih maju jika dibandingkan dengan kota atau kabupaten yang lain. Telah dapat dibuktikan secara nasional bahwa Surakarta berhak menerima penghargaan sebagai Kota Layak Anak, walaupun dalam realitanya belum bisa menciptakan Kota Layak Anak sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah sesuai indikator yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Negara PPPA Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.¹²

Dari berbagai program dan peraturan yang telah dilaksanakan di Surakarta, tentunya ada sebuah pencapaian atau tingkat keberhasilan dari suatu program atau peraturan tersebut. Berikut adalah tingkat keberhasilan dari program dan peraturan mengenai implementasi kota layak anak :

1. Klaster *pertama* yaitu mengenai hak sipil dan kebebasan. Keberhasilan penerapan Hak sipil dan kebebasan yang telah berjalan di Kota Surakarta diantaranya, ada akta kelahiran gratis, yang pada saat ini 99,98% anak di Kota Surakarta sudah mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran, ada KIA (Kartu Identitas Anak) yang berguna sebagai tabungan anak yang bernama SILA,

¹² Rita Hastuti, Sekretaris Pengurus Yayasan KAKAK, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Rabu, 16 Juni 2021, Pukul 15.00 WIB.

yang dalam hal ini bekerjasama dengan Bank BNI. Adanya pembentukan forum anak, yang bertujuan anak diikutsertakan dalam musren dalam pembangunan, baik musren tingkat daerah maupun musnas tingkat nasional, karena disini anak sebagai pelopor dan pelapor. Untuk forum anak di Kota Surakarta sudah ada di 5 kecamatan dan 51 forum anak di tingkat kelurahan. Kemudian adanya fasilitas informasi layak anak, yaitu telah terdapat 18 perpustakaan kampung dan 6 taman cerdas. Lalu ada radio KONATA, di mana mulai dari MC dan narasumbernya juga anak, yang menjelaskan mengenai kegiatan anak.¹³

2. Klaster *kedua* yaitu mengenai lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Keberhasilan pada klaster kedua ini ditunjukkan dengan adanya angka perkawinan di Kota Surakarta setiap tahunnya mengalami penurunan. Maka artinya dengan adanya lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak telah membuahkan hasil yang baik. Masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas yang tersedia dengan baik.¹⁴
3. Klaster *ketiga* yaitu mengenai kesehatan dasar dan kesejahteraan, salah satunya adalah adanya Puskesmas Ramah Anak. Keberhasilan pada klaster ketiga ini adalah turunnya angka kematian bayi pada setiap tahunnya, imunisasi dasar lengkap 100% bari dari umur 0 bulan s/d 1 tahun meningkat setiap tahun, jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental ada di 5 kecamatan, jumlah anak dari keluarga miskin memperoleh akses peningkatan kesejahteraan ada di 5 kecamatan dan meningkat setiap tahunnya, rumah tangga dengan akses air bersih sudah 200%, dan tersedia kawasan tanpa rokok.¹⁵

¹³ Ajati Udi UDJ, Bidang Analisis Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta, Senin, 28 Juni 2021, Pukul 10.00 WIB.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Ajati Udi UDJ, Bidang Analisis Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta, Senin, 28 Juni 2021, Pukul 10.00 WIB.

4. Klaster *keempat* yaitu mengenai pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya. Keberhasilan Kota Surakarta pada klaster keempat ini antara lain angka partisipasi pendidikan anak usia dini, tersebar di 5 kecamatan dan 51 kelurahan di Surakarta, wajib belajar pada pendidikan minimal 12 tahun telah terlaksana 100%, sekolah ramah anak telah terlaksana sebanyak 25% tersebar di 5 kecamatan dan selalu meningkat setiap tahun, jumlah sekolah yang memiliki program sarana dan prasarana perjalanan anak dari rumah ke sekolah ataupun sebaliknya, mulai dari halte anak, helm anak secara gratis, dan zona selamat sekolah tersebar di 5 kecamatan, kemudian adanya ketersediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah dengan anak diluar sekolah, seperti dongeng anak, kemah forum anak, dan jamboree forum anak maupun sanggar tari.¹⁶
5. Klaster *kelima* yaitu mengenai perlindungan khusus. Hal ini mendukung anak bebas dari permasalahan sosial, seperti anak yang orang tuanya koruptor, anak yang orang tuanya buronan, dan anak tersebut tidak boleh diasingkan. Keberhasilan yang telah dicapai oleh Kota Surakarta pada klaster kelima ini adalah telah adanya PPT di 5 kecamatan, telah tersedia pendampingan dari LSM pemerhati anak dan lembaga penyedia layanan bagi anak korban kekerasan, adanya kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (*Restiratif Justice*) yang angkanya setiap tahun semakin menurun dan melibatkan 43 LSM, dibentuknya satuan penanggulangan bencana dan pengungsi seperti PMI, Kesbangpol, dan LSM. Kemudian pembebasan anak dari pekerjaan terburuk anak, dan telah ada peningkatan pengawasan maupun penegakan hukum

¹⁶ *Ibid.*

terhadap K3, serta pelatihan keterampilan dan praktek bagi anak terlantar.¹⁷

Program kota layak anak mengadopsi dari hak-hak dasar anak sesuai yang telah dijelaskan diatas, akan tetapi masih ada hak dasar anak yang belum dibentuk program ataupun aturannya, yaitu mengenai Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua. Sehingga sangat perlu dibuatkan program agar anak lebih paham akan ilmu agama yang tentunya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia anak.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis mengenai implementasi Program Kota Layak Anak di Kota Surakarta, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Program Kota Layak Anak merupakan suatu program yang diciptakan untuk memenuhi dan melindungi hak anak sesuai dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Penerapan Program Kota Layak Anak di Kota Surakarta telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota. Kemudian dari berbagai pelayanan dan fasilitas yang telah ada dan berjalan, tentunya tidak luput dari kontribusi dari beberapa aspek, dalam mewujudkan Kota Layak Anak, mulai dari tingkat pemerintahan, lingkungan, keluarga, maupun kehadiran kurang lebih 74 (tujuh puluh empat) stakeholder

¹⁷ Ajati Udi UDJ, Bidang Analisis Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta, Senin, 28 Juni 2021, Pukul 10.00 WIB.

yang ada dan tersebar di kota Surakarta, yang ikut mensukseskan program tersebut.

2. Pengimplementasian Program Kota Layak Anak di Kota Surakarta, masih banyak ditemukan hal-hal yang menghambat kota Surakarta menjadi kota layak anak yang sepenuhnya dan menjamin hak-hak anak. Karena di kota Surakarta masih ditemukan iklan-iklan rokok yang tersebar di kota Surakarta, yang seharusnya itu tidak diperbolehkan ada di kota layak anak. Kemudian belum semua masyarakat paham mengenai pentingnya tercapainya hak anak, maka masih sering ditemukan anak-anak yang hidup dijalan, meminta-minta atau mengamen dengan alasan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kemudian belum semua hak dasar anak ada programnya, seperti hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua, dimana hak ini sangatlah penting, akan tetapi belum ada programnya didalam pelaksanaan kota layak anak di Surakarta.

4.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti hendak menyampaikan beberapa saran yang relevan di tujukan untuk pemerintah, penegak hukum dan pihak yang berperan dalam pelaksanaan Program Kota Layak Anak khususnya di Surakarta, dan pembaca pada umumnya:

1. Kepada Pemerintah, khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hendaknya agar lebih intens dan lebih baik lagi dalam mengawal pelaksanaan Program Kota Layak Anak.
2. Kepada pemerintah dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) untuk lebih bersinergi melakukan sosialisasi dalam berbagai bentuk, bisa melalui perkumpulan tingkat RT, Kelurahan, Kecamatan, atau melalui social media. Diharapkan dengan adanya sosialisasi tersebut masyarakat kota Surakarta khususnya dapat

mengetahui seberapa penting penjaminan hak anak terhadap masa depan anak.

3. Kepada Aparat Penegak Hukum (APH), dalam menangani kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hak anak, hendaknya lebih teliti dan lebih objektif. Hal ini bertujuan agar menciptakan efek jera kepada pelaku. Tidak dipungkiri bahwa berdasarkan kasus yang telah terjadi, sang pelaku merupakan korban dari pelanggaran hak anak yang menimpa dirinya ketika ia masih usia anak.

PERSANTUNAN

Penulis mengucapkan banyak terimakasih dan mempersembahkan karya tulis ini pertama, kepada kedua orang tua tercinta Drs. Suparno HS dan Rusmiyati, serta kakak dan saudara-saudara penulis yang senantiasa memberikan dukungan, do'a, dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. Kedua, ucapan terimakasih kepada keluarga besar BKBH FH UMS, sahabat dekat, dan teman-teman penulis yang senantiasa mendukung dan mendokan penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Surbakti, N, 2010. *Filsafat Hukum Perkembangan Pemikiran dan Relevansinya dengan Reformasi Hukum Indonesia*. Surakarta: BP-FKIP UMS.

Tim MKU LPIDB UMS, 2016, *Materi Ajar Kuliah Pendidikan Pancasila*, Sukoharjo: Jasmine.

Sofyan, Andi & Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Makasar: Pustaka Pena Press.

Prakoso, Abintoro, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: LekasBang PRESSindo.

Jurnal Ilmiah

Simamora, Janpatar, 2014, *Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. (3 September 2014).

Hamudy, Moh Ilham A, 2015, *Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak DI Surakarta Dan Makassar*, Jurnal Bina Praja, Vol. 7, No. 2, (Juni 2015).

Sukoco, Bambang, 2016, "PENDEKATAN RESTORATIF JUSTICE SEBAGAI

UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA CYBER DENGAN PELAKU ANAK (Studi tentang Penyelesaian Tindak Pidana Cyber di SMP Negeri Ngemplak, Boyolali)”, Jurnal Law and Justice, Vol. 1 No. 1 Oktober 2016, hal 59.
Krisna, Liza Agnesta, 2012, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Yogyakarta: CV Budi Utama.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Pemerintah

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Peraturan Menteri Negara PPPA Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.

Wawancara

UDJ, Ajati Udi, Bidang Analisis Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta 28 Juni 2021.

Hastuti, Rita, Sekretaris Pengurus Yayasan KAKAK, Wawancara Pribadi, Surakarta, Rabu, 16 Juni 2021.

Web

Open Data Kota Surakarta, 2021. *Data Penanganan Kasus terhadap Perempuan dan Anak di Kota Surakarta*, dalam <http://data.surakarta.go.id/sk/dataset/data-penanganan-kasus-terhadap-perempuan-dan-anak-di-kota-surakarta-tahun-2019>.

Muliyawan, 2015, *Paradigma Baru Hukum Perlindungan Anak Pasca Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak*, dalam <http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perlindungan-anak>.

Asy Syariah.com, 2020, *Anak Lahir di Atas Fitrah*, dalam <https://asysyariah.com/anak-lahir-di-atas-fitrah/>